

Kesetaraan Tingkat Pelayanan Fasilitas Sosial Dalam Perspektif Keadilan Ruang

Rizal Setiawan¹, Joesron Alie Syahbana²

Diterima : 26 Juli 2017

Disetujui : 1 Desember 2017

ABSTRACT

Questions on equality of municipal service facilities, one of which is social facilities, often emerge from people with poor economic status. In addition, the equality application of social facilities service distribution has given birth to service level characteristics based on regional segmentation and economic status. Therefore, the purpose of this study is to assess the form of urban facilities services in the perspective of spatial justice. This study implements empirical examples of junior high school facility services in Surakarta. In addition, to achieve research objectives, the researcher utilizes analysis of service level, descriptive analysis (municipal public transportation network), analysis of service level typology (overlay), analysis of service distribution (autocorrelation moran's I and local indicator of spatial autocorrelation (LISA)), movement network analysis (accessibility) and quantitative analysis of descriptive statistics. Distribution of municipal facility forms concentric pattern. Consumption of services in general follows the social characteristics with random pattern. Service efficiency and effectiveness dominate the areas with concentric pattern. The inhabitants of the service area are generally unable to contribute to the service outcome of supply. Service efficiency and effectiveness are influenced by both social characteristics and criteria.

Keywords: equality of service level, spatial justice, social facilities

ABSTRAK

Pertanyaan atas kesetaraan pelayanan fasilitas kota, salah satunya fasilitas sosial seringkali muncul dari masyarakat dengan status ekonomi miskin. Selain itu, penerapan kesetaraan distribusi pelayanan fasilitas sosial telah melahirkan karakteristik tingkat pelayanan berdasarkan segmentasi kawasan serta status ekonomi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah menilai bentuk pelayanan fasilitas kota dalam perspektif keadilan ruang. Penelitian ini, menggunakan contoh empiris pelayanan fasilitas sekolah menengah pertama Kota Surakarta. Selain itu, untuk mencapai tujuan penelitian, di gunakan analisis tingkat pelayanan, analisis deskriptif (jaringan transportasi umum kota), analisis tipologi kelas pelayanan (overlay), analisis pola sebaran pelayanan (autocorrelation moran's I dan local indicator of spatial autocorrelation (LISA)), analisis jaringan pergerakan (aksesibilitas) dan analisis kuantitatif statistik deskriptif. Distribusi pelayanan fasilitas kota lebih kepada pola kosentris. Pengkonsumsian pelayanan pada umumnya mengikuti karakteristik sosial dengan pola acak. Efisiensi serta efektivitas pelayanan lebih di dominasi pada kawasan yang memiliki pola kosentris. Penduduk yang berada di dalam area pelayanan, umumnya tidak dapat memberikan kontribusi terhadap pelayanan hasil dari penyediaan. Efisiensi serta efektifitas pelayanan sangat di pengaruhi oleh karakteristik maupun kriteria sosial.

Kata Kunci: kesetaraan tingkat pelayanan, keadilan ruang, fasilitas sosial

¹ Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro
Kontak Penulis : setiawan.rizal51@yahoo.com

² Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Undip, Semarang, Jawa Tengah

PENDAHULUAN

Pertanyaan kesetaraan pelayanan fasilitas kota yang seringkali muncul dari masyarakat dengan status ekonomi miskin, pada dasarnya tidak dapat di lepaskan dari bagaimana kebijakan distribusi itu sendiri (Liao, Hsueh-Sheng, & Tsou, 2009). Kebijakan yang di susun dengan memprioritaskan keadilan ideal telah menciptakan sensitivitas ruang, dimana karakteristik tingkat pelayanan melahirkan segmentasi berdasarkan kelas ekonomi maupun kawasan. Selain itu, pada umumnya permasalahan mengenai kesetaraan pelayanan fasilitas kota lebih kepada klaim ruang, kemampuan ruang serta hubungan ruang (Wagner, 2011).

Kesetaraan merupakan salah satu elemen dari keadilan ruang dan lebih kepada siapa serta mendapat apa (Soja, 2009 dan Wagner, 2011). Sedangkan distribusi pelayanan fasilitas kota pada dasarnya memerlukan konsep proposional dalam penerapan kesetaraan, dimana efisiensi dan efektivitas merupakan syarat atas keseimbangan ruang (Hashem Dadashpoor, Rostami, & Alizadeh, 2016a). Proposional merupakan unsur utama dari perencanaan kota dan menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan distribusi, sehingga karakteristik sosial yang berkaitan dengan permintaan dapat melahirkan keharmonisan ruang sosial.

Ketetapan pemaknaan keadilan dalam memberikan kesetaraan pelayanan fasilitas kota memiliki dampak yang cukup besar bagi kualitas ruang sosial. Disisi lain, hasil distribusi seringkali membentuk pola konsentris, pada akhirnya melahirkan pola acak sesuai karakteristik sosial (Tsou, Hung, & Chang, 2005). Bassett, (2013) beranggapan bahwa pengkonsumsian dengan pola acak pada dasarnya memiliki korelasi dengan faktor pengganggu klaim ruang, kemampuan ruang serta hubungan ruang. Taleai et al., (2014) beranggapan bahwa, karakteristik tingkat pelayanan sering kali di pengaruhi oleh konsentrasi pelayanan yang merupakan hasil dari distribusi. Setiap individu pada dasarnya memiliki karakteristik tersendiri, sedangkan pengkonsumsian pelayanan fasilitas kota yang acak merupakan hasil dari kosekuensi atas perhitungan untung-rugi. Decimal (1999) dan Sen (1999) beranggapan bahwa, penerapan kesetaraan sangat memerlukan melepas faktor untung-rugi, dimana setiap kelompok sosial memiliki kebutuhan berbeda-beda.

Selain itu, ruang yang pada dasarnya merupakan bagian dari ideologis dan matrial, seringkali di perebutkan serta menjadi perdebatan oleh kelompok-kelompok tertentu (Hayden, 1995 dalam Bassett, 2013). Pertanyaan mengenai ruang sosial akan terus berlanjut pada skala ekonomi, yang dimana masyarakat dengan status ekonomi miskin seringkali di abaikan dalam perumusan kebijakan distribusi pelayanan kota, sedangkan penentu dari kualitas ruang itu sendiri adalah sosial sebagai pengguna. Disisi lain, penerapan keadilan ideal seringkali di lakukan dengan bentuk distribusi yang sama kepada individu yang berbeda, maka secara langsung berdampak pada kelompok masyarakat status ekonomi miskin serta kawasan tertentu, yang dimana hasil dari proses tersebut di perhatikan pada nilai akses pelayanan maupun aksesibilitas. Dari penerapan keadilan ideal sangat mengawatirkan akan terjadi kerenggangan hubungan sosial, khususnya pemisahan rasial berdasarkan status ekonomi (Ibrahim, Osman, & Bachok, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah menilai bentuk pelayanan fasilitas kota dalam perspektif keadilan ruang. Sedangkan sasaran penelitian adalah identifikasi tingkat pelayanan fasilitas kota, identifikasi tipologi kelas pelayanan fasilitas kota, identifikasi pola sebaran pelayanan fasilitas kota, analisis kemampuan masyarakat dalam mengakses lokasi pelayanan fasilitas kota dan identifikasi persepsi masyarakat mengenai pelayanan fasilitas kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan di dukung dengan metodode kualitatif. Sedangkan untuk pendekatan penelitian, yakni *supply*, spasial dan partisipan. Dasar atas penggunaan pendekatan *supply*, spasial dan partisipan di karnakan hasil dari distribusi dengan penerapan keadilan ideal, seringkali melahirkan karakteristik kesetaraan tingkat pelayanan, baik itu status ekonomi maupun kawasan.

Penelitian ini lebih kepada penggunaan data nominal, ordinal serta rasio. Selain itu, penelitian ini juga di dasarkan pada dua proses, dimana sebelum penggunaan pendekatan partisipan, di awali dengan pendekatan *supply* dan spasial dalam mengidentifikasi tingkat pelayanan fasilitas, tipologi kelas pelayanan fasilitas serta pola sebaran pelayanan fasilitas. Dasar penggunaan dua proses ini dikarnakan konsep keadilan tidak dapat di terapkan sebelum menemukan permasalahan dari penerapan kesetaraan. Dari hasil proses awal, kemudian di lanjutkan dengan analisis jaringan pergerakan i (titik awal) dan j (titik tujuan) serta identifikasi persepsi.

Selain itu, untuk teknik pengumpulan data yakni kuesioner, observasi serta dokumen. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner di lakukan validasi dan reabilitas data baik itu sebelum maupun sesudah identifikasi persepsi. Sedangkan analisis yang di gunakan adalah analisis tingkat pelayanan, analisis deskriptif, analisis tipologi kelas pelayanan (*overlay*), analisis pola sebaran pelayanan (*autocorrelation moran's I* dan *local indicator of spatial autocorrelation* (LISA)), analisis jaringan pergerakan i (titik awal) dan j (titik tujuan) dan analisis kuantitatif statistik deskriptif, terhadap variabel yang telah di tetapkan.

KAJIAN TEORI

Keadilan Ruang

Secara umum keadilan ruang tidak dapat di dasarkan hanya pada sosial, ekonomi dan lingkungan, akan tetapi lebih kepada bagaimana memandang ruang dengan lebih kritis (Soja, 2009). Meskipun pada dasarnya, keadilan ruang merupakan perpanjangan dari keadilan sosial, untuk mewujudkan kesetaraan dengan melibatkan masyarakat sipil dalam sebuah komunitas atau beberapa kelas sosial yang memperoleh bagian dalam distribusi ruang, (Robet Putnam dalam H. Dadashpoor & Rostami, 2011). Soja (2009) dan Wagner, (2011) juga menambahkan, sebagai titik awal dalam memandang keadilan ruang, yakni dengan melihat bagaimana bentuk dari distribusi yang merupakan hasil dari sebuah proses dan memiliki nilai sosial.

Pandangan Soja dan Wagner mengenai bentuk distribusi ruang merupakan konsep pemikiran dari Lefebvre (1992) yang kemudian menimbulkan pertanyaan “mengapa keadilan ruang” dan “apa itu keadilan ruang”. Williams, (2013) beranggapan bahwa keadilan ruang merupakan hubungan antara material (fisik) dan ideologis (pemikiran) yang kemudian di bentuk oleh hubungan sosial. Dengan berkembangnya pandangan, mengenai apa itu keadilan ruang, yang dimana keadilan ruang saat ini lebih mudah dikatakan sebagai bentuk kebebasan, kesetaraan, demokrasi dan berbagai hak yang di butuhkan oleh semua kelompok masyarakat (Soja, 2009; Wagner, 2011; Rocco, 2014 dan Gehl, 2015).

Selain itu Rocco, (2014) terdapat indikator yang menjadi prioritas dalam memberikan keadilan ruang di perkotaan, yakni keadilan, pilihan, aksesibilitas, konektivitas, dan

partisipasi. Keadilan sendiri memiliki prinsip dasar yang berupa kesepakatan (Decimal, 1999). Meskipun Decimal beranggapan prinsip keadilan merupakan hasil kesepakatan, akan tetapi konsep keadilan itu sendiri tidak dapat di artikan dengan sama atau merata. Keadilan berdasarkan prinsip kesepakatan memiliki batasan dalam pemaknaan, dimana harus terlepas dari unsur untung-rugi (Decimal, 1999). Decimal, (1999) terdapat dua prinsip keadilan yang perlu di cermati 1. setiap individu memiliki kebebasan dalam memilih dan 2. ketidak setaraan sosial merupakan hasil dari perhitungan untung-rugi. Disisi lain, terdapat kendala dalam mewujudkan keadilan ruang, dimana hingga saat ini tanah yang pada dasarnya merupakan sumber daya alam dan bertujuan untuk kepentingan umum seringkali di jadikan komoditas (Tadamun, 2016). Dengan menjadikan tanah sebagai komoditas, secara langsung akan mempengaruhi alokasi distribusi, dan pada akhirnya keadilan hanya dapat di nikmati oleh daerah atau kawasan tertentu berdasarkan segmentasi kegiatan.

Bentuk dari kebebasan berdasarkan prinsip keadilan, merupakan cara dalam mengatasi ketidak berdayaan individu, ini juga sangat erat kaitanya dengan hak politik ruang. Selain itu, konsep keadilan itu sendiri merupakan penentu dari keberhasilan pembangunan, yang dimana kebebasan merupakan sarana dalam mencapai tujuan utama pembangunan (Sen, 1999). Keterkaitan antara pembangunan dengan keadilan juga tidak dapat di lepaskan dari bagaimana bentuk distribusi itu sendiri, dimana hasil tersebut sangat menentukan produk kota di masa akan datang (Harland, Santos, & Barros, 2011). Tadamun, (2016) keberhasilan dari penerapan keadilan ruang ialah dengan reduksi pemberian bantuan pada daerah atau kawasan tertentu.

Fasilitas Kota

Fasilitas kota merupakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu fasilitas kota sendiri dapat di bagi menjadi dua kelompok utama, yakni fasilitas sosial dan fasilitas fisik (Sujarto, 1989 dalam Hargito, 2009). Secara umum pengertian dari fasilitas kota juga terbagi menjadi fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi (Muta'ali, 2015). Jahan & Osda, (1996); Tsou et al., (2005); Martínez, (2005) Chin-Hsien Liao et al., (2009); dan Hashem Dadashpoor et al., (2016) memandang fasilitas umum merupakan bagian dari fasilitas kota dan bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah fasilitas pendidikan. Fasilitas umum merupakan bagian dari infrastruktur pendukung dalam pembangunan wilayah dan kota (Sunyoto, 2015). Sedangkan Infastruktur itu sendiri, dapat di bagi menjadi dua, infastruktur wilayah dan infastruktur sosial (UN HABITAT, 2011). Disamping itu Muta'ali, (2015) beranggapan bahwa fasilitas umum dan sosial memiliki kaitan dengan pelayanan pendidikan, jaringan jalan, moda transportasi umum dan lain sebagainya, yang dapat mendukung aktivitas masyarakat dan memiliki ukuran skala pelayanan. Fasilitas sosial merupakan bagian dari infastruktur masyarakat dan infastruktur publik, dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan serta dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup (Vincent, 2006; Committee Rooms, 2009; dan Delwp Victoria, 2016).

Fasilitas Sosial (Pendidikan) dan Lokasi Sekolah

Fasilitas sosial yang di antaranya pendidikan merupakan barang dan jasa umum, investasi publik dalam sektor publik serta bagian dari pembangunan infrastruktur publik yang tidak dapat di bedakan dengan infrastruktur yang lain (Budimansyah 2004 dalam Hargito, 2009). Sedangkan pengguna jasa pendidikan sendiri adalah orang tua atau peserta didik (Rahman dan Hartoyo, 2010:2 dalam Liana, 2016). Fasilitas sosial, khususnya pendidikan pada dasarnya merupakan salah satu aspek utama dalam memberikan kenyamanan kota (Ernawi & Kuncoro, 2011). Disisi lain, Djojodipuro (1992:124) dalam Budhi, (2008) penyediaan fasilitas, juga dapat mempengaruhi keseimbangan spasial, dan tergantung dari jauh dekatnya alokasi

pelayanan fasilitas itu sendiri. Sedangkan lokasi sekolah memiliki peranan atas kepuasan dalam memperoleh kebutuhan hidup masyarakat pada suatu wilayah, kota dan lingkungan. Doxiadis (1968) dalam Hargito, (2009) beranggapan bahwa, kepuasan dalam memberikan pelayanan sangat tergantung pada jarak-waktu dan jarak-biaya. Hargito, (2009); Takumansang, (2010) dan Decentralized Basic Education 1 Management and Governance (2011), juga menambahkan ukuran dari daya pelayanan pendidikan, juga tidak dapat dilepaskan dari rasio ruang kelas dan jumlah rombel (rombongan belajar). Selain itu jumlah rombel (rombongan belajar) serta rasio guru juga menjadi pertimbangan atas ukuran daya pelayanan fasilitas pendidikan (Widianantari, 2008 dan Decentralized Basic Education 1 Management and Governance, 2011).

Tingkat Pelayanan Fasilitas Sosial (Pendidikan)

Tingkat pelayanan fasilitas sosial pada dasarnya, merupakan ukuran dari kemampuan layanan pada suatu kawasan baik berdasarkan radius maupun kapasitas unit layanan (Lagrab & Akin, 2015 dan Green & Argue, 2012). Utoro, (2006); Hargito, (2009); Green & Argue, (2010) dan Green & Argue, (2012) juga menambahkan, untuk ukuran dari tingkat pelayanan fasilitas sosial dapat diukur berdasarkan standar pelayanan, baik itu penyediaan (*supply*) serta permintaan (*demand*). Selain itu sentralitas, tingkat aksesibilitas, konektivitas, bentuk perencanaan fasilitas pelayanan dan tingkat kecukupan layanan fasilitas juga menjadi penentu ukuran dari tingkat pelayanan fasilitas sosial (Muta'ali, 2015). Sedangkan Jahan & Oda, (1996) dan Green & Argue, (2010) lebih melihat, bagaimana bentuk dari kepadatan pelayanan fasilitas sosial dengan konsentrasi penduduk. Selanjutnya untuk tingkat pelayanan fasilitas sosial (pendidikan) dapat di lihat berdasarkan kelas pelayanan pada suatu wilayah, kota dan lingkungan berdasarkan pengukuran Muta'ali, (2015) yang di antaranya, indeks tingkat pelayanan fasilitas, indeks sentralitas, indeks aksesibilitas, indeks konektivitas, indeks ketersediaan pelayanan, indeks tingkat ketersediaan pelayanan, rasio daya pelayanan, indeks wilayah pelayanan indeks pelayanan fasilitas dan tingkat kecukupan layanan fasilitas. Selain itu dalam melihat tingkat pelayanan skala lingkungan juga perlu mengukur aksesibilitas, baik itu berdasarkan jarak, waktu, dan biaya dalam menuju sarana sosial (pendidikan) dari tempat asal (Tsou et al., 2005; Hargito, 2009; Chin-Hsien Liao et al., 2009; Green & Argue, 2012; Lagrab & Akin, 2015; dan Shahraki et al., 2016). Sedangkan biaya perjalanan sendiri, dapat di lihat dari jaringan jalan dan kemiringan lereng (Greenberg, Rueda, Hestir, Santos, & Ustin, 2011). Halden et al., (2005) dalam Mokgalaka, (2015) menambahkan, dalam memberikan pertanyaan guna mendefinisikan aksesibilitas harus sesuai dengan komponen utama dari aksesibilitas, yakni “siapa” atau “dimana”, “apa” dan “bagaimana”.

Disisi lain pola dari sebaran ruang juga mempengaruhi tingkat pelayanan fasilitas sosial, yang di antaranya pendidikan. Dengan demikian maka perlu mengetahui bagaimana bentuk distribusi ruang dan struktur ruang dari masing-masing sebaran fasilitas umum, yang di antaranya adalah pendidikan (Ko-Wen Tsou, 2005). Tsou et al., (2005) juga menawarkan, untuk memperoleh bagaimana bentuk dari distribusi ruang dan struktur ruang dari masing-masing sebaran fasilitas umum, yang di antaranya adalah pendidikan, dengan menggunakan metode *autocorrelation* (yang di dukung dengan moran's I) dan *local indicator of spatial autocorrelation* (LISA). Pada dasarnya penggunaan *local indicator of spatial autocorrelation* (LISA), untuk membantu hasil penilaian dari metode *autocorrelation* yang seringkali menyembunyikan nilai dari kelompok terkecil (Ko-Wen Tsou, 2005). Dengan mengetahui bagaimana pola sebaran pelayanan, maka akan terlihat bentuk dari ketidak setaraan pelayanan fasilitas SMP berdasarkan skala lingkungan. Pola sebaran pelayanan pada dasarnya terbagi dalam tiga bentuk, yaitu : tipe regular, tipe random, dan tipe cluster (Utoro, 2006; Widianantari, 2008 dan Haggett, 1968 dalam Hargito, 2009).

Keadilan dan Kesetaraan Distribusi Fasilitas Pendidikan

Keadilan dan kesetaraan memiliki makna yang hampir sama serta cukup sulit untuk di pisahkan. Akan tetapi, keadilan akan memiliki kandungan makna, apa bila telah menjadi masalah dari ketidak setaraan. Martínez, (2005) beranggapan bahwa, ketika terdapat ketidak setaraan dalam penyediaan fasilitas kota, salah satunya fasilitas sosial dan telah di tetapkan sebagai sebuah masalah, maka pendekatan keadilan dapat di gunakan. Selain itu Rawls, (1999;24) dalam Allingham, (2016) beranggapan bahwa, keadilan dapat dikatan sebuah keadilan, yang dimana semua orang membutuhkan kesetaraan tanpa terlepas dari keuntungan. Sering kali pemaknaan, dari keadilan di samakan dengan proporsi. Keadilan seperti ini hanya lah menggambarkan bentuk ideal dari keadilan itu sendiri. Vallentyne, (2012) keadilan tidak dapat di lakukan berdasarkan proporsi yang sama pada setiap individu yang berbeda. Hal ini karna, ketika keadilan distribusi yang hanya melihat proporsi maka bukan ideal nya. Kandungan makna tersebut sangat berbeda dengan keadilan praktis yang lebih mengutamakan setiap individu memperoleh distribusi berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Pendekatan keadilan praktis juga sesuai dengan pandangan dari (Smith, 2000 & Martinez, 2009) siapa dan mendapat apa.

Persepsi Masyarakat Mengenai Pelayanan Fasilitas Pendidikan

Persepsi pada dasarnya merupakan suatu proses pemberian arti oleh seseorang pada lingkungan dan kemudian di tafsirkan untuk memahami kondisi saat itu, (Walgito, 2001:53 dalam Maryati, 2009). Namun secara umum, persepsi dapat di artikan sebagai proses yang dimana individu dapat atau akan memberikan arti terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam bentuk kesan (Anahuraki, 2012). Sedangkan untuk memahami dasar dari kebutuhan atau keinginan masyarakat akan fasilitas pelayanan pendidikan perlu pendekatan dengan cara mengetahui persepsi masyarakat atas alokasi fasilitas pelayanan (Tsou et al., 2005).

Pemilihan Sekolah

Faktor yang mempengaruhi pemilihan sekolah antara lain sosial dan ekonomi (Ibrahim, Osman, & Bachok, 2014). Selain itu Maryati, (2009) dalam pemilihan sekolah aksesibilitas merupakan faktor yang paling di pertimbangkan. Aksesibilitas juga tidak lepas dari bagaimana sistem transportasi dan efektivitas jaringan jalan (Ervita, 2011). Scheerens, (2003) beranggapan bahwa, dampak dari pendidikan sekolah awal, akan terlihat pada persyaratan nilai sekolah tujuan. Dari kondisi tersebut akan melahirkan pertanyaan, dimana ukuran perbandingan kualitas sekolah A dengan sekolah B yang merupakan perbedaan populasi siswa pada dua sekolah tersebut (Scheerens, 2003). Budhi, (2008) lebih melihat, bagaimana kebutuhan dapat mempengaruhi pengkonsumsian pelayanan fasilitas pendidikan. Ini juga akan berdampak pada kepuasan dan kesesuaian dengan harapan terhadap pemilihan pelayanan fasilitas pendidikan itu sendiri. Kepuasan pelanggan merupakan penentu dari keberhasilan dalam penyediaan pelayanan, (Liana, 2016). Kondisi sebaliknya juga dapat terjadi, apabila pelayanan pendidikan tidak memberikan kepuasan terhadap orang tua atau peserta didik, maka yang terjadi adalah hilangnya minat untuk menikmati pelayanan tersebut (Liana, 2016). Selain itu, seringkali orang tua merupakan faktor utama dalam memilih pendidikan negeri atau swasta bagi anak-anak mereka, (Beavis, 2004 dalam Ibrahim, Osman, & Bachok, 2014). Alasan tersebut juga tidak terlepas dari kualitas sekolah dan biaya sekolah.

STUDI KASUS

Kota Surakarta

Isu kesetaraan tingkat pelayanan fasilitas SMP memiliki korelasi dengan *supply* dengan *demand*. Selain itu, produksi ruang Kota Surakarta sendiri lebih memprioritaskan distribusi

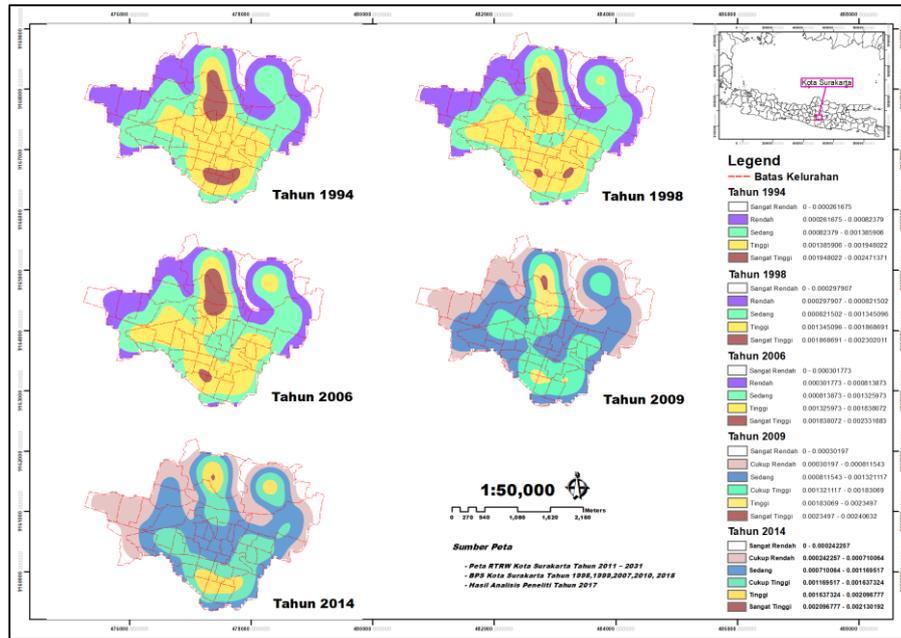
pada kawasan tertentu dengan pola kosentris. Sedangkan kepadatan penduduk per tahun lebih berorientasi ke luar, atau dengan kata lain, hasil distribusi pelayanan fasilitas SMP telah melahirkan segmentasi kawasan berdasarkan status ekonomi.

GAMBARAN UMUM

Kota Surakarta atau sering di kenal dengan Kota Solo memiliki luas 44,04 km², yang terdiri atas 5 kecamatan dan 51 kelurahan. Selain itu, Kota Surakarta memiliki topografi bervariasi, dimana pada bagian Selatan dan Barat memiliki ketinggian ± 95 m, sedangkan pada bagian Utara dan Timur memiliki ketinggian >100 m.

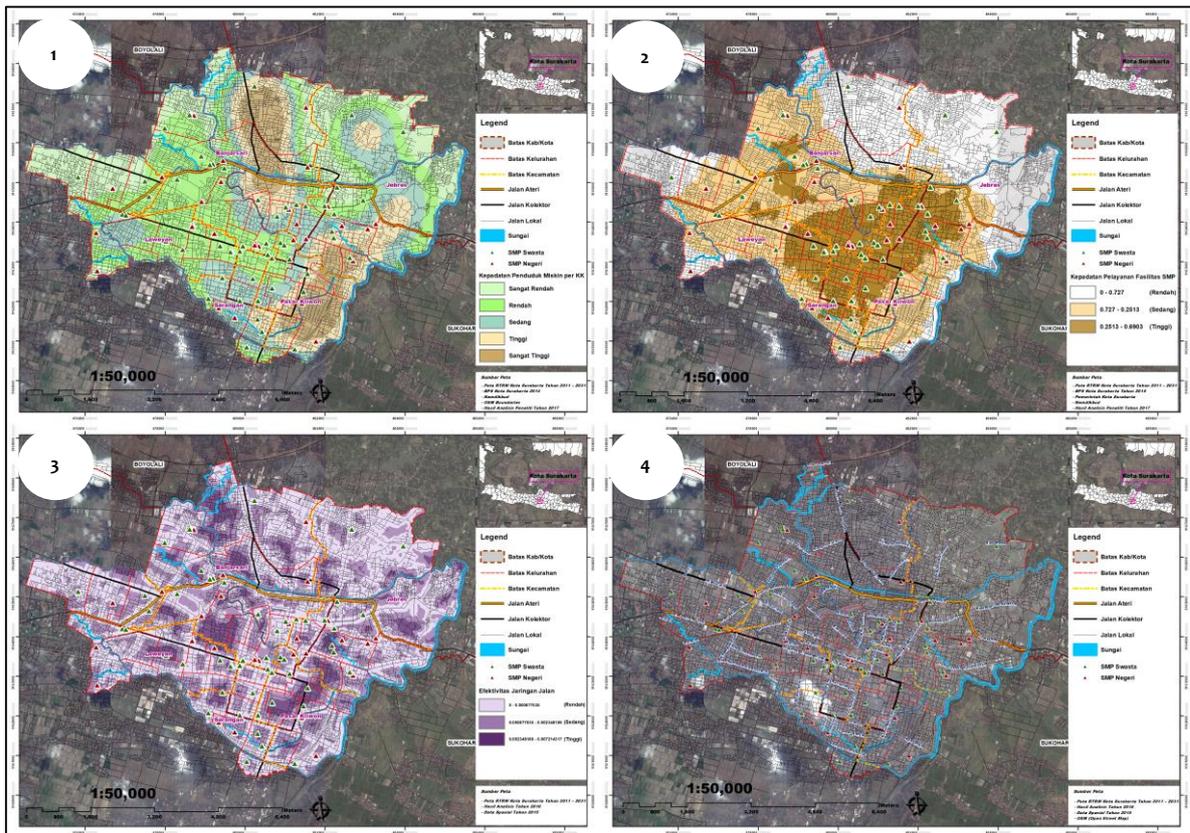
Untuk sejarah pelayanan pendidikan Kota Surakarta di mulai sejak konsep modernisasi Tahun 1745 (Riyadi, 2009). Selain itu, pada Tahun 1970 total pelayanan fasilitas pendidikan, khususnya SMP di dominasi oleh pelayanan Swasta yakni, 31 unit, sedangkan pelayanan Negeri 10 unit. Perkembangan pelayanan SMP, dari tahun 1970 hingga 2015 dapat di katakan fluktuatif serta letak pelayanan lebih di dominasi pada bagian Tengah kota. Disisi lain kepadatan penduduk usia sekolah jenjang SMP dari tahun 1984-2014 berorientasi ke luar kota, dan untuk kepadatan penduduk miskin per KK dengan skala tinggi – sangat tinggi berada di Barat Laut serta Tenggara kota. Di samping itu, efektivitas jaringan jalan dengan klasifikasi tinggi, lebih di dominasi pada bagian Barat serta Selatan kota. Dari kondisi tersebut secara langsung telah menggambarkan produksi ruang Kota Surakarta, yang dimana telah menghasilkan segmentasi baik itu status ekonomi maupun kawasan.

Sedangkan tipologi pelayanan fasilitas SMP Kota Surakarta dengan kondisi baik di dominasi di bagian Barat atau Kecamatan Banjarsari serta Laweyan. Disisi lain, meskipun pada umumnya bagian Barat memiliki permasalahan pada *demand* baik itu rasio ruang kelas per rombongan dan rasio sekolah per murid, akan tetapi kondisi tersebut telah di dukung oleh pola sebaran pelayanan yang merupakan hasil dari distribusi. Permasalahan *demand* dari pelayanan fasilitas SMP bagian Barat pada dasarnya tidak seburuk bagian Utara serta Timur, yang dimana baik itu tipologi serta pola sebaran pelayanan berada pada kisaran skala sedang hingga rendah. Selain itu, jaringan transportasi umum kota pada umumnya tidak dapat menjangkau pelayanan fasilitas SMP.



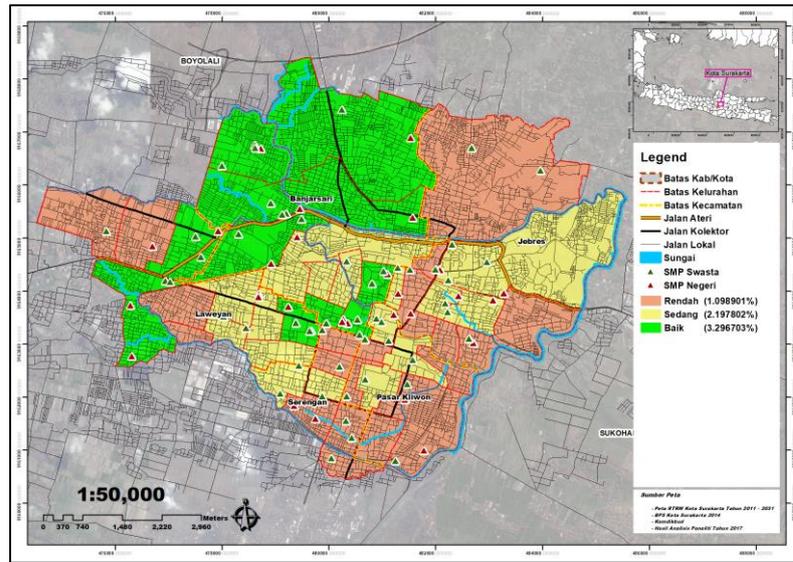
Sumber: Hasil Analisis, 2017

GAMBAR 1
KEPADATAN PENDUDUK USIA SEKOLAH JENJANG SMP



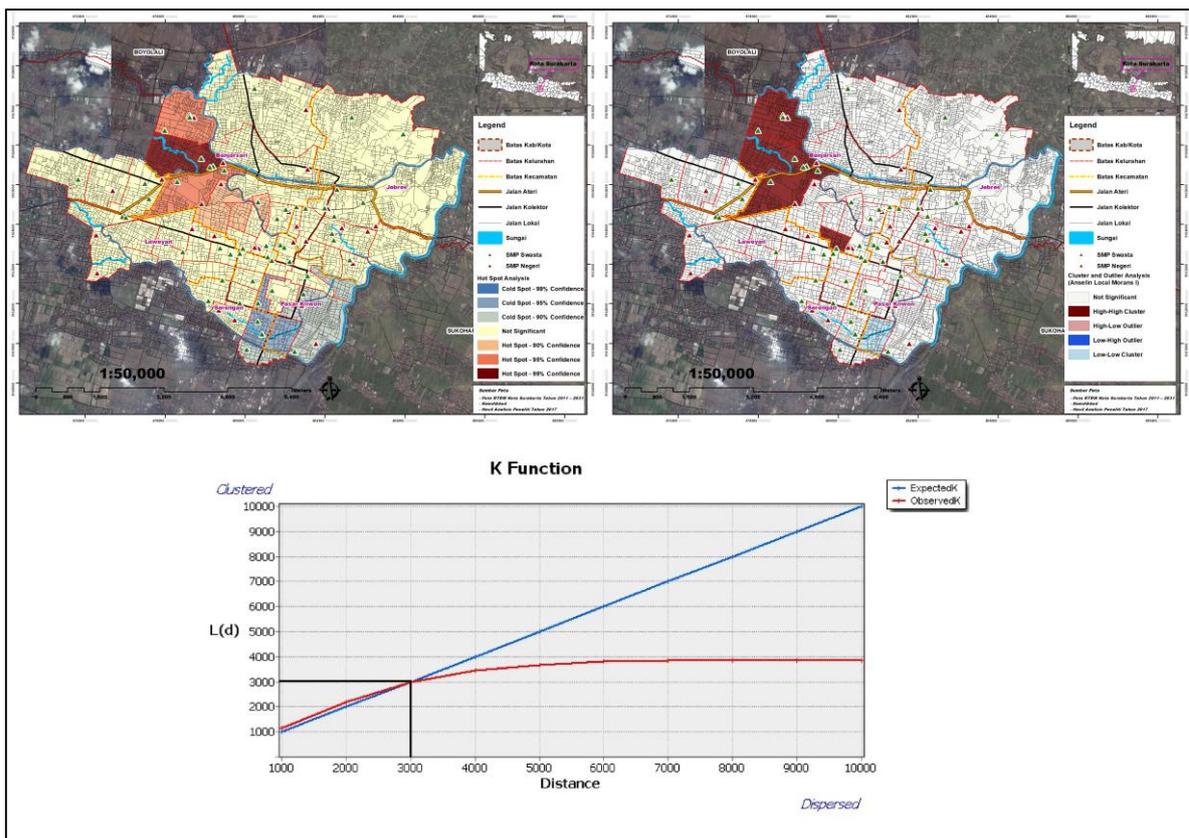
Sumber: Hasil Analisis, 2017

GAMBAR 2
 (1)KEPADATAN PENDUDUK MISKIN PER KK, (2)KEPADATAN PELAYANAN FASILITAS SMP,
 (3)EFEKTIVITAS JARINGAN JALAN DAN (4)JARINGAN JALAN



Sumber: Hasil Analisis, 2017

GAMBAR 3
TIPOLOGI KELAS PELAYANAN FASILITAS SMP



Sumber: Hasil Analisis, 2017

GAMBAR 4
HOT SPOT, CLUSTER DAN JARAK PELAYANAN FASILITAS SMP

Jarak cluster pelayanan dengan kisaran 1000m-3000m telah memperlihatkan distribusi pelayanan yang lebih kepada pola kosentris. Selain itu, dari pola kosentris telah melahirkan segmentasi kawasan, dimana bagian Utara memiliki kemampuan pengkonsumsian yang

rendah. Selain itu, penggunaan lahan Kota Surakarta, pada umumnya di dominasi oleh areal terbangun. Perbedaan kemampuan dalam memperoleh pelayanan fasilitas SMP pada dasarnya memiliki korelasi dengan distribusi yang dimana merupakan hasil dari produksi ruang. Hasil dari produksi ruang juga dapat terlihat berdasarkan pola sebaran pelayanan, dimana letak fasilitas SMP lebih di dominasi pada zona nilai tanah 2.000.000,00 - >20.000.000,00.

Sedangkan untuk kebijakan peningkatan pelayanan fasilitas SMP pada tahun 2031 berdasarkan RTRW Kota Surakarta tahun 2012, yakni sebanyak 79 unit. Penambahan kebutuhan pelayanan fasilitas SMP itu sendiri akan membentuk zona pendidikan dengan pembagian kawasan di Kecamatan Banjarsari, Jebres, Laweyan dan Pasar Kliwon, atau dengan kata lain, distribusi yang di lakukan hanya terkonsentrasi pada satu tempat secara berskala. Disisi lain, berdasarkan RDTR Kawasan I Kota Surakarta, untuk tahun 2034 jumlah kebutuhan pelayanan fasilitas SMP 3 unit, yang di distribusikan pada Kecamatan Serengan (Kelurahan Tipes dan Kelurahan Serengan) serta Kecamatan Pasar Kliwon (Kelurahan Semanggi). Selain itu, penambahan pelayanan fasilitas SMP, berdasarkan RDTR Kawasan III Kota Surakarta, untuk kebutuhan tahun 2014, 2019, 2024, 2029 dan 2034, umumnya di distribusikan pada Kecamatan Banjarsari, khususnya pada Kelurahan Nusukan dan Kelurahan Kadipiro, dengan masing-masing tahap pendistribusian 2 unit sekolah.

ANALISIS

Kemampuan Masyarakat Dalam Mengakses Pelayanan Fasilitas SMP (i dan j)

Distribusi pelayanan fasilitas SMP yang tidak melihat kebutuhan, kemampuan serta pilihan, telah menghasilkan perbedaan jarak, waktu maupun biaya pada kawasan berdasarkan tingkat pelayanan. Selain itu, baik jarak, waktu maupun biaya yang besar berada di kawasan bagian Utara (tingkat pelayanan sedang), sedangkan terkecil di miliki oleh kawasaan Selatan (tingkat pelayanan rendah). Perbedaan kemampuan mengakses pelayanan tidak terlepas dari pola sebaran pelayanan itu sendiri, terlebih lagi dengan efektivitas jaringan jalan dengan klasifikasi rendah, yang di miliki oleh kawasan Utara. Disisi lain, untuk kawasan Barat (tingkat pelayanan tinggi) juga memiliki jarak, waktu maupun biaya dapat di katakan sedang, akan tetapi pada umumnya kawasan ini telah di dukung oleh baik itu efektivitas jaringan jalan serta pola sebaran pelayanan yang tinggi.

TABEL 1
JARAK, WAKTU DAN BIAYA PERJALANAN KAWASAN TINGKAT PERLAYANAN TINGGI, SEDANG MAUPUN RENDAH

Jarak Perjalanan	< 1 km	1 - 2 km	2 - 3 km	> 3 km
Kawasan Tingkat Pelayanan Tinggi	18.35%	40.51%	28.48%	12.66%
Kawasan Tingkat Pelayanan Sedang	5.65%	32.77%	29.94%	31.64%
Kawasan Tingkat Pelayanan Rendah	34.43%	53.01%	7.10%	5.46%
Waktu Perjalanan	< 15 menit	15 - 30 menit	30 - 60 menit	> 60 menit
Kawasan Tingkat Pelayanan Tinggi	13.92%	44.30%	38.61%	3.16%
Kawasan Tingkat Pelayanan Sedang	5.08%	30.51%	45.76%	18.64%
Kawasan Tingkat Pelayanan Rendah	33.33%	52.46%	12.57%	1.64%
Biaya Perjalanan	0	0.000287 - 0.000431		> 0.000431
Kawasan Tingkat Pelayanan Tinggi	13.56%	57.63%		28.81%
Kawasan Tingkat Pelayanan Sedang	3.13%	39.06%		57.81%
Kawasan Tingkat Pelayanan Rendah	23.73%	57.63%		18.64%

Sumber : (Hasil Analisis Tahun 2017)

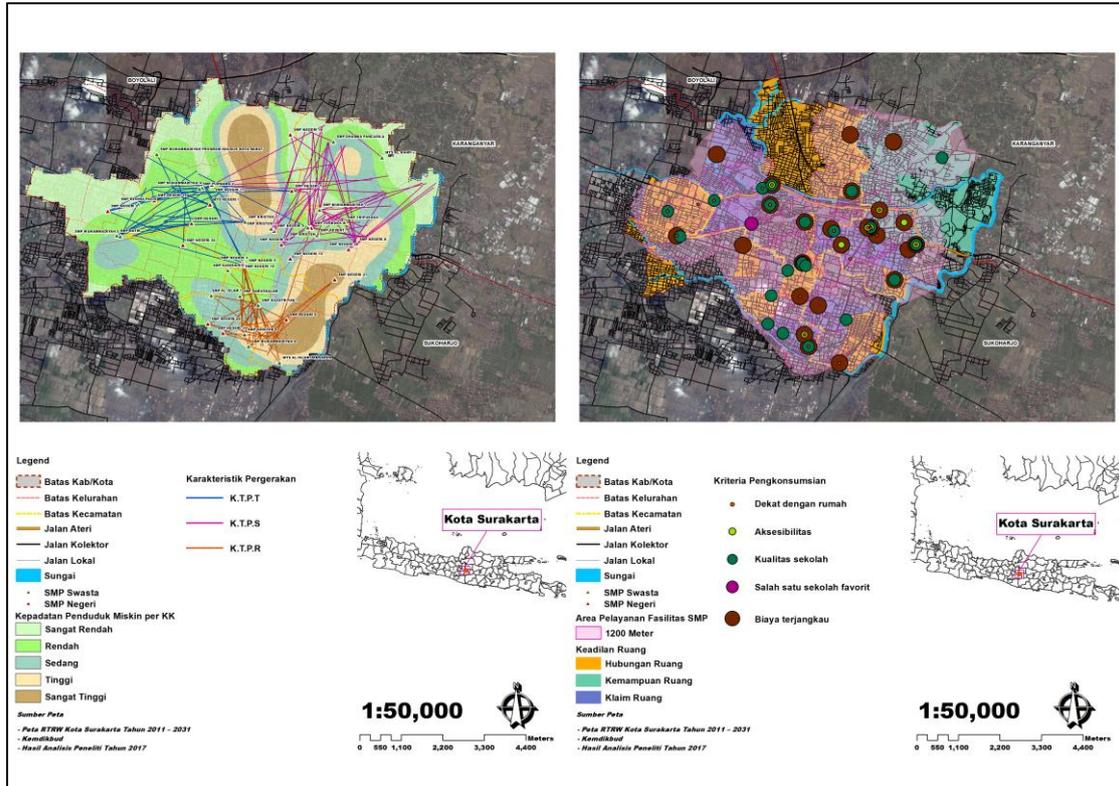
Persepsi Masyarakat Mengenai Pelayanan Fasilitas SMP

Berdasarkan hasil identifikasi persepsi masyarakat mengenai tingkat kesulitan masuk (persyaratan nilai) SMP, tingkat kepuasan terhadap pelayanan pendidikan, tingkat kesesuaian dengan harapan, biaya sekolah, aksesibilitas, kondisi jalan serta kemudahan angkutan umum kota, dimana setiap kawasan tingkat pelayanan tinggi memiliki nilai yang bervariasi. Variasi pada setiap kawasan berdasarkan tingkat pelayanan, menunjukkan kualitas pelayanan yang ada di lingkungan maupun luar lingkungan. Di samping itu, kualitas pelayanan yang dapat dikatakan baik lebih didominasi baik itu luar lingkungan serta pada bagian Barat maupun Tengah kota (kawasan tingkat pelayanan tinggi).

Selain itu, untuk tingkat kesulitan masuk (persyaratan nilai) SMP, tingkat kepuasan terhadap pelayanan pendidikan, tingkat kesesuaian dengan harapan, biaya sekolah, aksesibilitas, kondisi jalan serta kemudahan angkutan umum kota, setiap kawasan tingkat pelayanan berdasarkan status ekonomi juga memiliki nilai yang bervariasi.

Sedangkan persepsi mengenai pelayanan fasilitas SMP, pada umumnya berkaitan dengan biaya sekolah serta kesulitan masuk (persyaratan nilai) bagi kawasan tingkat pelayanan rendah dengan status ekonomi miskin, ini juga tidak dapat di lepaskan dari pengkonsumsian pelayanan awal. Untuk kawasan tingkat pelayanan sedang status ekonomi miskin memiliki permasalahan pada tingkat kepuasan terhadap pelayanan pendidikan, tingkat kesesuaian dengan harapan serta biaya sekolah. Rendahnya nilai persepsi kawasan tingkat pelayanan sedang status ekonomi miskin juga berkaitan dengan pemilihan sekolah, dimana orang tua lebih memilih pelayanan di dalam lingkungan. Di samping itu, masyarakat dengan status ekonomi kaya juga memiliki permasalahan pada biaya sekolah, ini juga tidak dapat di lepaskan dari pemilihan sekolah. Dengan demikian permasalahan pada biaya pendidikan merupakan dampak dari pemilihan pelayanan fasilitas itu sendiri.

Dari nilai persepsi yang di peroleh secara langsung telah memperlihatkan klaim ruang, kemampuan ruang serta hubungan ruang. Perbedaan karakteristik serta kriteria pengkonsumsian tidak di dukung oleh distribusi berdasarkan keadilan praktis, maka secara langsung berdampak pada segmentasi kawasan berdasarkan status ekonomi. Dari hasil distribusi juga melahirkan kerenggangan hubungan sosial, dimana bagian Utara (kawasan tingkat pelayanan sedang) memiliki kesulitan untuk mencapai pelayanan fasilitas serta memperoleh pelayanan fasilitas berdasarkan kualitas pelayanan.



Sumber: Hasil Analisis, 2017

GAMBAR 5
KARAKTERISTIK PERGERAKAN DAN KEADILAN RUANG

KESIMPULAN

Kesetaraan tingkat pelayanan fasilitas kota sangat di tentukan dari produksi ruang yang merupakan hasil perumusan kebijakan. Disisi lain, perumusan kebijakan dengan mengedepankan kesetaraan berdasarkan keadilan ideal, akan menghasilkan karakteristik tingkat pelayanan. Penerapan keadilan ideal itu sendiri lebih menguntungkan kelompok dengan status ekonomi tertentu, atau dengan kata lain, pertanyaan kesetaraan akan lahir dari kelompok berdasarkan status ekonomi miskin. Dampak atas penerapan keadilan ideal juga akan terlihat dari pola konsumsi yang lebih mengedepankan biaya serta kualitas pelayanan. Selain itu, karakteristik tingkat pelayanan juga seringkali terlihat pada segmentasi kawasan serta sosial ekonomi, dimana perbedaan kemampuan pergerakan merupakan hasil dari cluster pelayanan fasilitas kota, ini juga di karnakan kebijakan distribusi yang lebih memprioritaskan keadilan ideal akan membentuk pola kosentris. Sedangkan pola kosentris dari pelayanan itu sendiri akan mempengaruhi pengkonsumsian berdasarkan karakteristik serta kriteria sosal atas pelayanan. Distribusi pelayanan fasilitas yang menghasilkan pola kosentris, secara langsung akan menjadi faktor pengganggu klaim ruang, kemampuan ruang maupun hubungan ruang.

Penyediaan pelayanan fasilitas kota, yang pada dasarnya bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat, melancarkan kegiatan sosial serta memenuhi butuhan dasar hidup sangat tergantung dari perumusan kebijakan kota. Disisi lain, perumusan kebijakan kota seringkali mengabaikan partisipasi masyarakat, sedangkan kualitas ruang itu sendiri sangat tergantung dari sosial sebagai pengguna. Selain itu, penyediaan pelayanan fasilitas sosial

yang tidak mengedepankan partisipasi masyarakat akan melahirkan pertanyaan dari kesetaraan itu sendiri, dimana penduduk yang berada di dalam area pelayanan, umumnya tidak dapat memberikan kontribusi terhadap pelayanan hasil dari penyediaan, di karenakan penduduk memiliki karakteristik dan kriteria dalam pemilihan pelayanan. Atau dengan kata lain, karakteristik serta kriteria penduduk atas pelayanan, telah membaaur dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar hidup.

Terpenuhinya karakteristik serta kriteria sosial merupakan keberhasilan pembangunan berdasarkan konsep keadilan ruang. Kesetaraan yang seharusnya melepaskan faktor untung rugi telah di abaikan dari penerapan keadilan ideal, yang dimana cara seperti ini akan melahirkan kerenggangan hubungan sosial, khususnya pemisahan rasial berdasarkan status ekonomi.

Karakteristik tingkat pelayanan berdasarkan segmentasi kawasan juga secara langsung memperlihatkan bagaimana, koneksi atas sudut pandang dari status ruang dan status objek terdapat kekosongan, dimana ideologis dan material telah berjalan sendiri bersamaan dengan rancangan kebijakan kota, pada akhirnya segregasi ruang perkotaan dapat terlihat di masing-masing proporsi pelayanan fasilitas sosial. Dari *cluster* serta pola kosentris pelayanan telah memperlihatkan bagaimana kecenderungan atas material dengan produksi ruang kota terhadap pasar. Pasar yang selalu memiliki dominasi atas matrial dapat mengancam keharmonisan ruang dan sosial.

Sedangkan keharmonisan antara ruang dan sosial, merupakan wujud dari keadilan praktis. Dimana, keadilan praktis merupakan penentu dari keberlangsungan kualitas penduduk maupun kenyamanan kota. Pada akhirnya, tujuan dari perencanaan kota dapat terwujud dengan mengkolaborasi keadilan praktis di dalam perumusan kebijakan distribusi pelayanan fasilitas sosial kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. (2016). Distributive Justice. *Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP)*. Retrieved from <http://www.iep.utm.edu/dist-jus/>
- Anahuraki. (2012). *Persepsi, Sikap dan Nilai*. Retrieved from <http://anahuraki.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/BAB-4-PERSEPSISIKAP-NILAI.pdf>
- Bassett, S. M. (2013). The Role of Spatial Justice in the Regeneration of Urban Spaces. *Urban Planning*, (May). Retrieved from https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/45124/Bassett_NEURUS_Capstone.pdf?sequence=2
- Budhi, Z. A. (2008). *Perluasan Akses Pelayanan Pendidikan SMP (Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)*. Diponegoro.
- Committee Rooms. (2009). *Social and Community Facilities. Planning & City Development*. Retrieved from http://www3.westminster.gov.uk/docstores/publications_store/FINAL_Social_and_community.pdf
- Dadashpoor, H., & Rostami, F. (2011). Measurement of Integrated Index of Spatial Justice in the Distribution of Urban Public Services Based on Population Distribution, Accessibility and Efficiency in Yasuj City. *Urban - Regional Studies and Research*, (10).
- Dadashpoor, H., Rostami, F., & Alizadeh, B. (2016a). Is inequality in the distribution of urban facilities inequitable? Exploring a method for identifying spatial inequity in an Iranian city. *Cities*, 52, 159–172. <http://doi.org/10.1016/j.cities.2015.12.007>

- Dadashpoor, H., Rostami, F., & Alizadeh, B. (2016b). Is inequality in the distribution of urban facilities inequitable? Exploring a method for identifying spatial inequity in an Iranian city. *Cities*, 52, 159–172. <http://doi.org/10.1016/j.cities.2015.12.007>
- Decentralized Basic Education 1 Management and Governance. (2011). *Penghitungan Biaya Pencapaian Standar dan Akses (PBPSA)*. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Decentralized Basic Education Management And Governance dan USAID Dari Rakyat Amerika. Retrieved from http://www.prioritaspendidikan.org/file/Penghitungan_Biaya_Pencapaian_Standar_dan_Akses_Nov_11_11.pdf
- Decimal, D. (1999). A Theory of Justice by John Rawls. *Criticism*, 1–6. <http://doi.org/10.2307/2504913>
- Ernawi, I. S., & Kuncoro, D. (2011). *Buletin Tata Ruang, Pembangunan Berkelanjutan Penerapan Masa Lalu, Saat ini dan Masa Datang*. BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional). Retrieved from http://www.tataruangpertanahan.com/file_peraturan/916219083034-Buletin-Tata-Ruang-Edisi-Juli-Agustus-2011-Pembangunan-Berkelanjutan-Penerapan-Masa-Lalu-Masa-Kini-dan-Masa-Datang.pdf
- Ervita, A. (2011). *Kota Layak Anak (Studi Kasus di Kecamatan Pasar Kliwon , Kota Surakarta)*. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta. Retrieved from <https://digilib.uns.ac.id/>
- Gehl, & J. M. B. (2015). Public in NYC 's Plazas. In *Cities for People and Center on Design for the Just City* (pp. 1–119). The City College of New York. Retrieved from www.gehlpeople.com
- Green, C., & Argue, T. (2010). *Summary Guidelines and Standards for the Planning of City of Cape Town Social Facilities and Recreational Spaces*. CSIR Built Environment. This City Works For You and CSIR.
- Green, C., & Argue, T. (2012). Geographic accessibility study of social facility and government service points for the metropolitan cities of Johannesburg and eThekweni. In *CSIR Built Environment. This City Works For You and CSIR*.
- Greenberg, J. A., Rueda, C., Hestir, E. L., Santos, M. J., & Ustin, S. L. (2011). Least cost distance analysis for spatial interpolation. *Computers and Geosciences*, (September 2016). <http://doi.org/10.1016/j.cageo.2010.05.012>
- Hargito. (2009). *Integrasi Sebaran Lokasi SMP Dan Sebaran Permukiman Di Kota Pati. Diponegoro*. Retrieved from <http://eprints.undip.ac.id/17507/1/HARGITO.pdf>
- Harland, R., Santos, M. C. L. dos, & Barros, M. T. L. de. (2011). Developing Urban Design Discourse Beyond The Critical Point: The Case Of São Paulo. *Loughborough's*, (November). Retrieved from <https://dspace.lboro.ac.uk/2134/9397>
- Ibrahim, N. M., Osman, M. M., & Bachok, S. (2014). Public School Development and Planning: Parents' Criteria of Selecting Public School in Gombak District. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 153, 274–285. <http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.061>
- Jahan, S., & Oda, T. (1996). Distribution of Public Facilities in Dhaka , Bangladesh : A Spatial Analysis. *Urban and Regional Planning Human Sciences*. Retrieved from <http://www2.kobe-u.ac.jp/~oda/Jahan&Oda.pdf>
- Ko-Wen Tsou, Y.-T. H. * dan Y.-L. C. (2005). An accessibility-based integrated measure of relative spatial equity in urban public facilities. *Cities*, 22(6), 424–435. <http://doi.org/10.1016/j.cities.2005.07.004>
- Liana, N. A. (2016). Analisis faktor yang mempengaruhi kepuasan orang tua peserta didik terhadap layanan pendidikan. *Manajemen Pendidikan*, 25(1), 39–46.
- Liao, C.-H., Hsueh-Sheng, C., & Tsou, K.-W. (2009). Explore the Spatial Equity of Urban Public

- Facility Allocation Based on Sustainable Development Viewpoint. *Urban Planning*, 6(April), 137–145. Retrieved from http://www.realcorp.at/archive/CORP2009_48.pdf
- Martinez, J. (2009). The use of GIS and indicators to monitor intra-urban inequalities. A case study in Rosario, Argentina. *Habitat International*, 33(4), 387–396. <http://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.12.003>
- Martínez, J. (2005). *Monitoring intra-urban inequalities with GIS-based indicators (With a case study in Rosario, Argentina)*. Universiteit Utrecht.
- Maryati, S. R. I. (2009). *Preferensi Masyarakat Dalam Memilih Sekolah Menengah Kejuruan Negeri*. Diponegoro. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/18273/1/SRI__MARYATI.pdf
- Mokgalaka, H. (2015). *GIS-Based Analysis of Spatial Accessibility: An Approach to Determine Public Primary Healthcare Demand in Metropolitan Areas*. University of Cape Town. Retrieved from https://open.uct.ac.za/bitstream/item/14743/thesis_ebe_2015_mokgalaka_hm.pdf?sequence=1
- Muta'ali, L. (2015). Teknik Analisis Regional. In *Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Riyadi. (2009). Modernisasi Kota Surakarta Awal Abad XX. *Heritage Society*, (Sejarah dan Morfologi Kota Konflik Solo: Dari Periode Kolonial – Orde Baru). Retrieved from <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=172271&val=4059&title=Modernisasi Kota Surakarta Awal Abad XX>
- Rocco, R. (2014). *Spatial Justice Thesis Award, Urbanism*.
- Scheerens, J. (2003). Peningkatan Mutu Sekolah. In A. Syahid (Ed.), *Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan* (1st ed.). PT. Logos Wacana Ilmu/United Nations. Retrieved from <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001224/122424indo.pdf>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press. Retrieved from <http://www.c3l.uni-oldenburg.de/cde/OMDE625/Sen/Sen-intro.pdf>
- Shahraki, A. A., Ebrahimzadeh, I., & Kashefidoost, D. (2016). Distributional Planning of Educational Places in Developing Cities With Case Studies. *Habitat International*, 51, 168–177. <http://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.10.015>
- Smith, D. M. (2000). Social Justice Revisited. *Environment and Planning*, 32, 1149–1162. <http://doi.org/10.1068/a3258>
- Soja, E. W. (2009). The City and Spatial Justice. *Planning [in] Justice*, 1–5. Retrieved from <http://www.jssj.org/wp-content/uploads/2012/12/JSSJ1-1en4.pdf>
- Tadamun. (2016). *Spatial Justice in the Greater Cairo Region*. *Planning [in] Justice The*. Retrieved from www.tadamun.info
- Taleai, M., Sliuzas, R., & Flacke, J. (2014). An Integrated Framework To Evaluate The Equity of Urban Public Facilities Using Spatial Multi-Criteria Analysis. *Cities*, 40, 56–69. <http://doi.org/10.1016/j.cities.2014.04.006>
- Tsou, K. W., Hung, Y. T., & Chang, Y. L. (2005). An accessibility-based integrated measure of relative spatial equity in urban public facilities. *Cities*, 22(6), 424–435. <http://doi.org/10.1016/j.cities.2005.07.004>
- UN HABITAT. (2011). *Infrastructure For Economic Development And Poverty Reduction In Africa*. In *In United Nations Human Settlements Programme*. UN-HABITAT. Retrieved from http://www.citiesalliance.org/sites/citiesalliance.org/files/3074_alt.pdf
- Usman, S. (2015). *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Utoro, R. I. (2006). *Kajian Optimalisasi Pola dan Tingkatan Pelayanan Sarana Dasar di Kota Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang*. Diponegoro.
- Vallentyne, P. (2012). *Distributive Justice*. Retrieved from <https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/10157/DistributiveJustice>

- e.pdf;sequence=1
- Victoria, D. (2016). Moonee Valley Planning Scheme. In *Planning & Environment*. Schemes Online accessed from the Department of Environment, Land, Water and Planning. Retrieved from http://planning-schemes.delwp.vic.gov.au/schemes/combined-ordinances/MooneeValley_PS_Ordinance.pdf
- Vincent, J. M. (2006). Public Schools as Public Infrastructure: Roles for Planning Researchers. *Journal of Planning Education and Research*, 25, 433–437. <http://doi.org/10.1177/0739456X06288092>
- Wagner, C. (2011). Spatial Justice and the City of São Paulo. In *Applied Cultural Sciences* (pp. 1–48). Retrieved from <http://opus.uni-lueneburg.de/opus/volltexte/2012/14212/pdf/SpatialJustice.pdf>
- Widianantari. (2008). *Kebutuhan dan Jangkauan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang*. Diponegoro. Retrieved from <http://eprints.undip.ac.id/17703/1/WIDIANANTARI.pdf>
- Williams, J. (2013). *Toward a Theory of Spatial Justice*. *Wpsa.Research.Pdx.Edu*. University of Michigan.